BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai audit internal dan pengawasan intern terhadap *good government governance*, maka pada bagian akhir dari penelitian, peneliti menarik simpulan dan saran sebagai berikut.

5.1 Simpulan

1. Pelaksanaan audit internal pada keseluruhan dinas di wilayah Kabupaten Cianjur sudah cukup. Hal ini ditujukan berdasarkan dimensi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian, penyampaian hasil periksa serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang cukup mempengaruhi jalannya kinerja dinas. Sedangkan berdasarkan indikator, penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan masih kurang baik. Hal ini terjadi karena masih terdapat masalah mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti, tidak sesuai dengan rekomendasi, dan belum sesuai rekomendasi. Selain itu pemerintah daerah kurang memperhatikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga mampu menciptkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pelaksanaan pengawasan intern pada keseluruhan dinas di wilayah Kabupaten Cianjur sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan *control environment, risk assessmen, control activities, information dan comunication serta monitoring* yang sudah berjalan dengan baik, walaupun belum dikategorikan sangat baik. Sebab masih terdapat kelemahan mengenai sistem pengendalian intern yaitu seperti lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dalam hal pencatatan yang

belum sesuai atau tidak akurat, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,dan lemahnya struktur pengendalian intern dimana entitas belum/tidak memiliki SOP, SPI (satuan pengawas intern) yang tidak memadai atau tidak berjalan optimal. Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumberdaya manusia karena perlu proses yang matang untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas.

3. Pelaksanaan *good government governance* secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Cianjur sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan dimensi partisipasi, aturan hukum, transparansi, berkeadilan, efektivitas,bervisi strategi dan saling keterkaitan yang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun belum sepenuhnya sangat baik, karena masih terdapat permasalahan dalam hal pelayanan terhadap stakeholders (publik) yaitu birokrasi sering mengambil kesempatan untuk mencari pendapatan tambahan dengan mempersulit prosedur administrasi disetiap rantai birokrasi. Artinya informasi dan komunikasi masih sulit untuk didapatkan oleh publik.
4. Audit internal dan pengawasan internal secara bersama – sama mempunyai korelasi yang cukup dan memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 42,9% terhadap perubahan *good government governance* dimana semakin baik implementasi audit internal dan pengawasan intern maka akan membuat *good government governance* pada dinas di Kabupaten Cianjur tinggi sebaliknya, semakin tidak baik implementasi audit internal dan pengawasan intern maka, *good government governance* akan rendah.

Diantara variabel independen, audit internal memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap *good government governance* pada dinas di wilayah Kabupaten Cianjur. Pengawasan intern secara parsial memberikan pengaruh sebesar 18,92% terhadap *good government governance,* sementara audit intern secara parsial memberikan 24,7% terhadap *good government governance.* Pengaruh audit internal dan pengawasan intern tersebut masih tergolong ke dalam skor yang cukup erat. Disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang masih minim serta sarana serta prasarana masih kurang sehingga muncul tindak kecurangan yang mengakibatkan *good government governance* yang belum tercapai secara maksimal.

5.1 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan evaluasi antara lain :

1. Pelaksanaan audit internal berperan dalam pencapaian *good government governance*, hendaknya semakin ditingkatkan sesuai dengan standar profesi karena pengaruhnya sangat tinggi dimana jika keprofesionalan auditor pemerintah sangat baik maka tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu untuk membangun pemerintahan yang baik.
2. Untuk pengawasan intern itu sendiri harus lebih ditingkatkan kembali dengan membuat Satuan Pengawas Intern (SPI) pada entitas (dinas), jika sudah memiliki, maka SPI yang ada harus dijalankan secara optimal dan memadai. Juga diharapkan entitas memiliki SOP yang formal untuk suatu

prosedur atau keseluruhan prosedur. Agar setiap tujuan memiliki prosedur yang berdampak terhadap penciptaan pemerintahan yang baik.

3. Untuk menciptakan *good government governance* pada dinas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan entitas terutama dalam hal melayani kepentingan publik agar mudah dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Serta tidak mempersulit stakeholders (publik) dalam melakukan prosedur administrasi di setiap rantai birokrasi.
4. Pengaruh audit internal dan pengawasan intern terhadap *good government governance* pada dinas di Kabupaten Cianjur dinilai cukup. Maka dari itu perlu ditingkatkan kembali audit internal dan pengawasan intern agar tercipta *good government governance*. Dengan kedisiplinan dan kinerja yang lebih ditingkatkan dan diperbaharui. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap sangat mendukung pencapaian tata kekola pemerintahan yang baik.